LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ASRI MAHYUDI

8335132400

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

LEMBAR EKSEKUTIF

Asri Mahyudi, *Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Jenderal DPR RI. Program Studi S1 Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.*

Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori. Setiap mahasiswa wajib mengikuti program ini. Dengan mengikuti program Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa diharapkan lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan pada bidang yang telah dipilih. PKL juga merupakan salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi dan juga dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Instansi Pemerintah yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan PKL dilakukan selama kurang lebih dua bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 hingga 12 Agustus 2016. Praktikan ditempatkan di Adminstrasi keuangan pada bagian Kas dan Pembukuan Sekretariat Jenderal DPR RI.

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Nuramalia Hasanah,SE.M.Ak
NIP. 19770617 200812 2 001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
Nuramalia Hasanah, SE.M.AK NIP. 19770617 200812 2 001	.....	17 Februari 2017
Penguji Ahli		
Petrolis Nusa Perdana, M.Acc NIP. 19800320 201404 1 001	.....	17 Februari 2017.
Dosen Pembimbing		
Dr. Mardi, M.SI NIP. 19600301 198703 1 001	.....	17 Februari 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga praktikan dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Pada kesempatan ini, praktikan ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu praktikan selama kegiatan PKL berlangsung dan pembuatan laporan ini, yaitu:

1. Papa, Mama, dan Adik tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materil kepada praktikan.
2. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak., selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Bapak Dr. Mardi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan PKL.

4. Bapak Agus Sutari, S.Sos. Selaku Bendahara Pengeluaran Satker Setjen yang telah mengizinkan praktikan untuk melaksanakan PKL di Sekretariat Jenderal DPR RI di bagian Kas dan Pembukuan.
5. Ibu Ratna selaku pembimbing di bagian kas dan Pembukuan. Bapak Djai, Pak Budi, Pak Yanto, Mas Dhanu dan Kak Anggi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada praktikan selama menjalankan PKL.
6. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat kepada praktikan dalam menjalani masa PKL ini.

Praktikan menyadari bahwa ada banyak keterbatasan dalam penyusunan laporan PKL ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh praktikan agar terciptanya perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang positif.

Jakarta, 10 Januari 2011

Praktikan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dalam dunia kerja merupakan salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Banyaknya lulusan dari perguruan tinggi inilah membuat persaingan di dalam dunia kerja menjadi semakin ketat. Pengangguran akan semakin bertambah apabila perguruan tinggi tersebut tidak dapat menjawab tantangan kualitas lulusannya. Ditambah lagi mulai diberlakukannya International Financial Report Standar (IFRS) pada tahun 2012 membuat para akuntan lulusan terbaru harus mampu dengan segera menyesuaikan diri terhadap standar yang berlaku.

Para lulusan tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan intelektual saja, namun harus memiliki kemampuan dasar. Pada umumnya mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu dan teori selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Sehingga mereka hanya mendapatkan kemampuan dasar berupa pengetahuan (knowlage) dan sikap (attitude), sementara itu keterampilan (skill) tidak mereka dapatkan dalam bangku perkuliahan. Untuk memiliki semua kemampuan dasar tersebut, mahasiswa perlu melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan . Dan dalam memenuhi tuntutan tersebut maka dilakukan kegiatan praktik kerja lapangan pada perusahaan yang sesuai dengan yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Sehingga diharapkan setelah

melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, mahasiswa akan memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya.

PKL merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum pendidikan universitas termasuk Universitas Negri Jakarta (UNJ) yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori. Setiap mahasiswa wajib mengikuti program ini. Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan pada bidang yang telah dipilih.

Dalam melaksanakan salah satu kurikulum pendidikan di Universitas Negri Jakarta, praktikan melakukan PKL pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Praktikan ditempatkan pada bidang Administrasi keuangan lebih tepatnya pada bagian Kas dan pembukuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PKL

Maksud dari PKL yang telah dilaksanakan adalah :

1. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah PKL dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Menambah wawasan tentang lingkungan kerja yang sebenarnya.
3. Menerapkan ilmu yang telah diajarkan dalam bangku perkuliahan.
4. Mengasah keterampilan (skill) sesuai bidang ilmu yang dipelajari.

Tujuan dari PKL adalah :

1. Mendapatkan wawasan seputar dunia kerja dalam bidang akuntansi pepajakan.
2. Mendapatkan pengalaman bekerja.
3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pekerjaannya.
4. Mengenalkan mahasiswa terhadap gambaran dunia kerja yang sebenarnya.

C. KEGUNAAN PKL

Adapun kegunaan PKL bagi Praktikan, universitas maupun bagi instansi pemerintahan tempat praktikan melaksanakan PKL adalah :

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)
   a. Melatih praktikan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bidang Akuntansi Perpajakan dalam instansi pemerintahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
   b. Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas dan disiplin dalam melaksanakan setiap tugas yang dibeikan oleh pembimbing.
   c. Meningkatkan kemampuan besosialisasi praktikan dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan kerja.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Jakarta
   a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan standar mata kuliah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia kerja saat ini.
   b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan pada bangku

perkuliahan.

3. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI

   a. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang bermanfaat antara instansi dengan pihak Univesitas Negri Jakarta.

   b. Merupakan cara untuk menjalin kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi dalam bidang-bidang pendidikan agar mempermudah penyaluran tenaga kerja profesional yang kompeten.

   c. Membina dan mendidik tenaga keja yang terampil dan kompeten sehingga dapat membantu instansi dalam mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.

D. TEMPAT PKL

Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan praktikan pada:

Nama Instansi	: Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat	: Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR / DPR RI Jl.Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Telepon	: 021 - 571 5876
Penempatan PKL	: Administrasi Keuangan Bagian Kas dan Pembukuan
Website	: http://www.dpr.go.id/

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Sekretariat Jenderal DPR RI karena bidang kerjanya sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh praktikan yaitu akuntansi perpajakan. Selama melaksanakan kegiatan PKL praktikan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

E. JADWAL DAN WAKTU PKL

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Sekretariat Jenderal DPR RI selama dua bulan, yaitu dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016. Ketentuan jam kerja praktikan sesuai dengan jam kerja normal yang berlaku di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Dikarenakan Bertepatan dengan bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan jam kerja yang dilakukan adalah pukul 08.00-15.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi dalam 3 tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Pada tahapan ini, praktikan membuat surat izin melaksanakan PKL dari Univesitas Negri Jakarta untuk diajukuan kepada instansi dimana Praktikan melakukan Kegiatan PKL, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tanggal 22 April 2016. Selanjutnya, praktikan mengajukan surat permohonan PKL kepada Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 28 April 2016 dan mendapatkan konfirmasi dari instansi pada tanggal 17 Mei 2016.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKL dilaksanakan selama ± dua bulan. Kegiatan PKL dilaksanakan mulai hari Senin 13 Juni 2016 sampai dengan hari Jumat 12 Agustus 2016. Praktikan menambahkan lima hari kerja untuk menyempurnkan kegiatan PKL yang tertunda karena libur hari raya idul fitri 2016 yang jatuh pada tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan 8 Juli 2016.

3. Tahap Penulisan Laporan

Tahapan pembuatan laporan PKL adalah tahapan terakhir dalam Kegiatan PKL ini. Pada Tahapan ini, praktikan menyusun laporan dari hasil kegiatan PKL selama ± dua bulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari peusahaan tempat praktikan PKL. Tahapan ini dimulai tanggal 15 Agustus sampai dengan laporan kegiatan PKL selesai disusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. SEJARAH INSTANSI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

a. Volksraad
b. Masa perjuangan Kemerdekaan
c. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekretaris Jenderal DPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat secara administratif dapat mengangkat sejumah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, dapat di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut adalah visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI :

1. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

   Memberikan bantuan optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis.

2. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

   a. Meningkatkan kualitas bantuan teknis dan administrasi kepada DPR RI.

   b. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam Bidang informas, kajian dan analisis kepada DPR RI.

   c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibuthkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

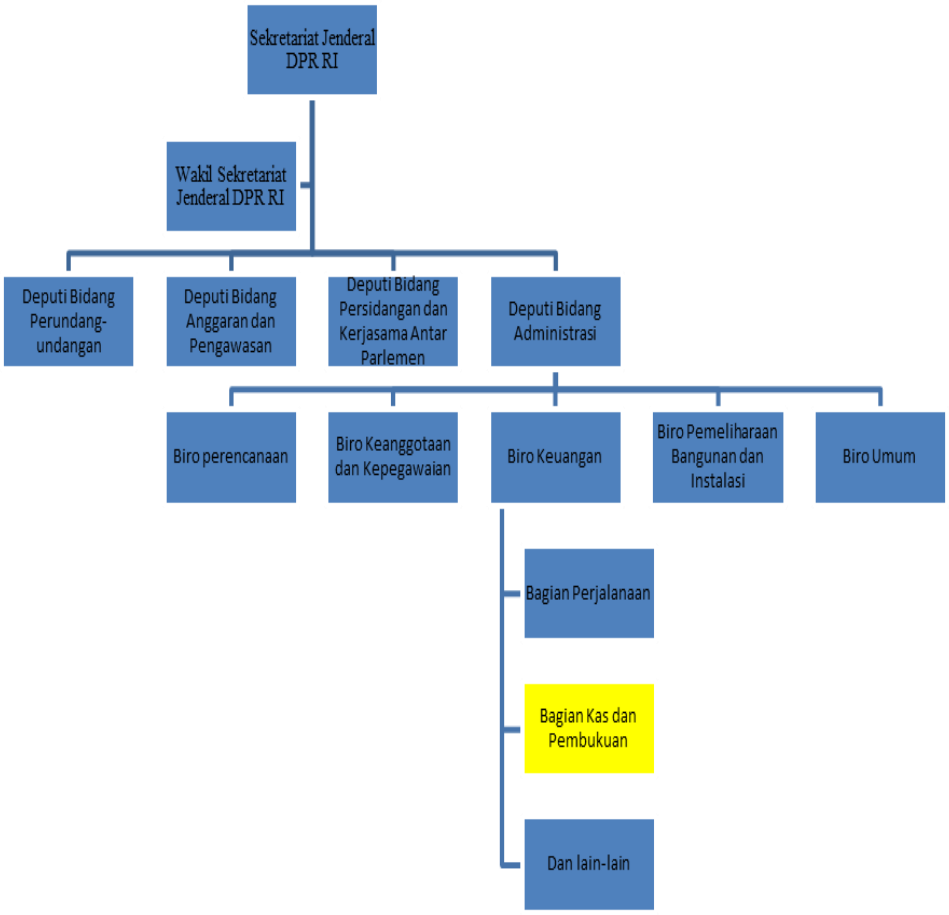

Sumber : Diolah oleh penulis/ dari http://www.dpr.go.id/

Keterangan:

: Tempat praktikan ditugaskan

Susunan atau bentuk struktur organisasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai dan merupakan faktor yang penting bagi efektifitas organisasi dalam mencapai sasaran, visi dan misi organisasi. Oleh karena itu bentuk struktur organisasi ini seringkali harus mengalami perubahan mengiringi tantangan dan tujuan organisasi yang dinamis dan cenderung menghadapi masalah ketidak pastian, terlebih dengan dimulainya era reformasi yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto sebagai "Presiden era Orde Baru", tuntutan terhadap peran DPR RI terus meningkat. Hal ini tentu terkait dengan kesiapan Sumber Daya Manusia.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bedasarkan peraturan-peraturan tersebut, perubahan yang terjadi dalam organisasi cukup luas, menyangkut perubahan paradigma yang semula didasarkan atas perbedaan tugas di bidang dukungan yang mencakup teknis, adminstratif, dan keahlian, menjadi dukungan yang didasarkan atas tugas pokok dan fungsi DPR RI yang mencakup peundang-undangan, anggaran dan pengawasan.

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas pokok Memberi bantuan di bidang teknis dan administratif kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administratif, organisasi, dan tata laksana terhadap seluruh unsur lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif persidangan DPR-RI;
2. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat serta melaksanakan pembinaan organisasi dan kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR-RI;
3. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan penyelesaian masalah hukum;
4. Menyelenggarakan urusan di bidang anggaran dan melaksanakan urusan keuangan;
5. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan;
6. Melaksanakan pengelolaan kompleks gedung dan peralatannya;
7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan intern.;

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasika pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal serta kegiatan lain yang ditugaskan Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari:

a. Deputi Bidang Perundang-undangan

Deputi Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, adminstratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk

memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Deputi Perundang-undangan mempunyai fungsi:

1) Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang peundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislagi.
2) Pemberian saran dan pertimbangan teknis, adminisratif dan keahlian di bidang Perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi.

b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan

Deputi Anggaran dan Pengawasan Mempunyai Tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Deputi Anggaran dan pengawasan mempunyai fungsi:

1) Pemberian dukungan teknis, adminisratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.
2) Pemberian sarana dan pertimbangan teknis, adminisratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.

c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang pesidangan dan kerjasama antar parlemen. Untuk menyelenggarakan

tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi:

1) Penyimpanan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen.
2) Pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI.
3) Pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen.
4) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan.
5) Pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

d. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan DPR RI. Untuk menyelenggarakan tugas, deputi bidang Administrasi mempunyai fungsi:

1) Pembinaan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.
2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari:

a) Biro Perencanaan dan Pengawasan, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran DPR RI serta kegiatan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.
b) Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan kegatan administrasi keanggotaan Dewan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

c) Biro keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

d) Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instansi, mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan instalasi.

e) Biro Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan perlengkapan, perusatan, kendaraan, serta keamanan dan ketertiban.

C. KEGIATAN UMUM

Kegiatan umum yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa yaitu :

1. Memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR.

2. Melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal.

3. Membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPR.

4. Memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT (Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat).

5. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang kepada Badan Musyawarah dan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat).

6. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di

penetapan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

7. Pemberian dukungan teknis, administrative dan keahlian dibidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI.

8. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan DPR RI.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. BIDANG KERJA

Selama kegiatan PKL berlangsung, praktikan diberi kesempatan untuk belajar tentang dunia kerja pada sektor pemerintahan. Praktikan ditempatkan sebagai staf di Biro keuangan, yang merupakan bagian kerja dari Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari empat bagian yaitu Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bagian Persidangan dan kerjasama Antar Paelemen, dan Deputi Bidang Administrasi. Dalam masa praktek praktikan ditempatkan pada bagian Kas dan Pembukuan.

Bidang kerja yang dilakukan praktikan selama PKL yaitu:

1. Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung
2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21
3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22
4. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23
5. Rekapitulasi Perhitungan PPN
6. Merapihkan Dokumen Penerimaan dan Penyetoran GU
7. Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan.

B. PELAKSANAAN KERJA

Peraktikan melaksanakan PKL di Sekretariat Jensral DPR RI pada tanggal 13 juni 2016 sampai dengan tanggal 12 agustus 2016. Adapun pekerjaan yang dilakukan praktikan pada bagian Kas dan Pembukan di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah:

1. Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung

   Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain contoh: pajak penghasilan (PPh) (Ambarita, Erik Manson. 2009).

   Praktikan melakukan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran Pajak Langsung. Pada Sekretariat Jenderal DPR RI pajak langsung akan diberikan dan dipotong oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) berdasarkan permintaan pembayaran yang telah diajukan dan telah diterima oleh pihak ke tiga yang bersangkutan. Besaran nominal yang dibayarkan dalam permintaan pembayaran dan penyetoran pajak langsung biasanya lebih dari Rp,50.000.000.00 dan pajak yang dikenakan dari traksaksi tersebut langsung dipotong oleh Negara. Praktikan merekap setiap transaksi yang ada pada pajak langsung seperti keterangan dari transaksi tersebut, pajak yang dikenakan, nomor dan tanggal SPM (surat perntah membayar), nomor dan tanggal SP2D (surat perintah pencairan dana) serta nomor BKU (buku kas umum) dari transaksi tersebut. Transaksi yang dilakukan meliputi belanja barang, pembayaran belanja pegawai dan pembayaran tunjangan pegawai.

   Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi

perhitungan dan penyetoran pajak langsung :

a. Mencacat nomor buku pada lembar kertas sesuai dengan data yang diberikan oleh pembimbing. Nomor buku disesuaikan dengan dengan nomer SPM.
b. Mengisi kolom sesuai dengan nomor dan tanggal SPM.
c. Mengisi kolom sesuai dengan nomor dan tanggal SP2D.
d. Mengisi kolom sesuai dengan nomor BKU.
e. Mengisi kolom sesuai dengan keterangan.
f. Mengisi kolom sesuai dengan jumlah tagihan.
g. Mengisi kolom sesuai dengan potongan pajak yang dikenakan dari setiap transaksi.
h. Menyesuaikan total pembayaran yang ada pada lembar kertas dengan lembar kerja.
i. Menyesuaikan jumlah penerimaan dan penyetoran pajak langsung yang ada pada lembar kerja dengan hasil yang diberitahukan oleh pembimbing setiap kali telah menyelesaikan tugas yang diberikan.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langusng.

Q50 | fx | 0

PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK LS

JULI 2016

SEKRETARIAT

NO	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nomor BKU	Keterangan	Jumlah Tagihan	Pajak					Potongan Lain	Total Pembayaran
								411121	411122	411128	411211	411124		
28	08730	29-Jun	161821302021430	1-Jul	10322		176,000,000	-	-	-	16,000,000	3,200,000	-	156,800,000
29	02583	1-Jul	161821302022100	13-Jul	10323		91,770,950	-	-	-	8,342,814	1,668,563	-	81,759,573
30	08704	1-Jul	161821302022043	12-Jul	10324		198,000,000	-	-	-	18,000,000	3,600,000	-	176,400,000
31	02584	1-Jul	161821302022039	12-Jul	10325		4,830,050	-	-	-	439,095	87,819	-	4,303,136
32	02586	1-Jul	161821302022033	12-Jul	10326		8,647,450	-	-	-	786,132	157,226	-	7,704,092
33	08705	1-Jul	161821302022036	12-Jul	10327		84,645,000	-	-	-	7,695,000	1,539,000	-	75,411,000
34	08709	1-Jul	161821302022037	12-Jul	10328		110,000,000	-	-	-	10,000,000	2,000,000	-	98,000,000
35	02540	1-Jul	161821302021975	12-Jul	10329		777,555,764	-	-	-	70,686,888	14,137,378	-	692,731,498
36	02585	1-Jul	161821302022038	12-Jul	10330		164,301,550	-	-	-	14,936,505	2,987,301	-	146,377,744
37	05016	1-Jul	161821302022048	12-Jul	10331		71,500,000	-	-	-	-	1,430,000	-	70,070,000
38	08624	1-Jul	161821302022034	12-Jul	10332		65,862,720	-		-	5,987,520	1,197,504	-	#VALUE!
39	02547	1-Jul	161821302022042	12-Jul	10333		97,793,000	-	-	-	8,890,273	1,778,055	-	87,124,672
40	09650	1-Jul	161821302022040	12-Jul	10334		49,085,000	-	-	-	4,462,273	669,341	-	43,953,386
41	09651	1-Jul	161821302022041	12-Jul	10335		119,746,990	-	-	-	10,886,090	1,632,913	-	107,227,987
42	09656	1-Jul	161821301017014	11-Jul	10336		102,300,000	-	-	-	9,300,000	1,860,000	-	91,140,000
43	00291	15-Jun	161821504000436	1-Jul	9955		5,695,649,921	40,157,093	-	-	-	-	483,426,128	5,172,066,700

Rekap | Summ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo. 2011, h.168)

Praktikan bertugas untuk merekap perhitungan PPh 21 yaitu pajak atas gaji, upah dan honorium, uang lembur, dan gaji progresif. Pajak atas gaji, upah dan honorium yang dihitung oleh praktikan merupakan gaji pegawai tetap Sekretariat Jenderal DPR RI selama satu bulan. selain itu ada upah dan honorium yang dibayarkan apabila Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan suatu kegiatan yang mengharuskan untuk membayar upah dan honoium,

misalnya pengadaan rapat dan mendatangkan pembicara dalam rapat tersebut, acara kegiatan kesehatan yang mengharuskan mendatangkan dokter baik dalam atau pun luar kantor, pengadaan sosialisasi suatu kegiatan yang mengharuska untuk mendatangkan narasumber, dan lain-lain.

Perhitungan potongan PPh 21 atas gaji, upah dan honorium disesuaikan dengan golongan jabatan tiap pegawai . ada golongan IV dengan tarif potongan 15% dari gaji kotor , golongan III dengan tarif potongan 10% dari gaji kotor dan golongan II dengan tarif potongan 0% dari gaji kotor.

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPh 21 atas gaji, upah dan honorium :.

a. Pemberian nomor pada lembar kertas dari transaksi pembayaran gaji yang di berikan
b. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama, jabatan, tarif potongan pajak, NPWP dan keterangan lain-lain praktikan dapat mengambil dari file yang telah di berikan oleh pembimbing.
c. Menyesuaikan tarif potongan pajak yang ada pada lembar kertas dengan lembar kerja.
d. Menyesuaikan hasil PPh 21 yang telah dihitung oleh praktikan dengan hasil yang diberikan oleh Pembimbing. apa bila hasil akhir tidak sesuai maka praktikan harus memeriksa kembali hingga kesalahan perhitungan tesebut dapat diperbaiki dan hasil akhir perhitungan praktikan sesuai dengan hasil akhir yang telah di berikan pembimbing.

Tabel 3.2 Rekap PPh 21 Gaji, Upah, dan Honorarium

	D	E	F	G	H	I	K	N	O	P	Q
1	NIP	Nomor Bukti Potong	NIP	NPWP	NIK	Nama	Gol	Jumlah Bruto	Tarif	Jumlah PPh	NP Pemotn
2	196005081983031001	1.4-05.16-0000028	196005081983031001	477990154005000	3175040805600001		IV/b	Rp 1,800,000	15	Rp 270,000	
3	196511081985091001	1.4-05.16-0000192	196511081985091001	471855783002000	3276010811650002		III/d	Rp 1,800,000	5	Rp 90,000	
4	198209082005022001	1.4-05.16-0000664	198209082005022001	246415343086000	317308409820006		III/c	Rp 1,800,000	5	Rp 90,000	
5	196610051991021001	1.4-05.16-0000546	196610051991021001	478051923002000	3175030510660010		III/c	Rp 700,000	5	Rp 35,000	2229
6	196407191991031001	1.4-05.16-0000020	196407191991031001	477990238002000	3175031907640005		IV/c	Rp 2,000,000	15	Rp 300,000	
7	196005081983031001	1.4-05.16-0000028	196005081983031001	477990154005000	3175040805600001		IV/b	Rp 1,800,000	15	Rp 270,000	
8	197109121997031001	1.4-05.16-0000248	197109121997031001	477991608001000	3175071209710001		III/d	Rp 1,800,000	5	Rp 90,000	
9	198209082005022001	1.4-05.16-0000664	198209082005022001	246415343086000	317308409820006		III/c	Rp 700,000	5	Rp 35,000	2230
10								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
11								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
12								Rp 2,800,000	15	Rp 504,000	
13								Rp 700,000	15	Rp 126,000	
14								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
15								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
16								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
17								Rp 700,000	15	Rp 105,000	
18								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
19								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
20								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
21								Rp 700,000	15	Rp 105,000	
22								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
23								Rp 2,800,000	15	Rp 504,000	
24								Rp 2,800,000	15	Rp 420,000	
25								Rp 700,000	15	Rp 105,000	2233
26	195611251982032001	1.4-05.16-0000001	195611251982032001	053585980086000	3173086511560002		IV/e	Rp 750,000	15	Rp 112,500	
27	195709111984031001	1.4-05.16-0000003	195709111984031001	051843183018000	3173081109570005		IV/e	Rp 750,000	15	Rp 112,500	
28	196107251988032001	1.4-05.16-0000035	196107251988032001	477990188031000	3133076507610005		IV/c	Rp 700,000	15	Rp 105,000	
29	196908011994032001	1.4-05.16-0000089	196908011994032001	471867432412000	3276054108690004		IV/b	Rp 650,000	15	Rp 97,500	
30	196105131993021001	1.4-05.16-0000201	196105131993021001	242496768411000	3674041305610006		III/d	Rp 600,000	5	Rp 30,000	
31	197602282000031001	1.4-05.16-0000278	197602282000031001	076632603035000	3173052802760008		III/d	Rp 500,000	5	Rp 25,000	
32	197105181998032011	1.4-05.16-0000105	197105181998032011	246729479416000	367111580710002		IV/a	Rp 500,000	15	Rp 75,000	
33	197009231998032001	1.4-05.16-0000243	197009231998032001	478051428411000	3603176309700001		III/d	Rp 500,000	5	Rp 25,000	
34	196904221997031001	1.4-05.16-0000101	196904221997031001	471745075412000	3276052204690006		IV/b	Rp 500,000	5	Rp 25,000	
35	196804011998032001	1.4-05.16-0000100	196804011998032001	477991343085000	3173064104680004		IV/a	Rp 500,000	5	Rp 25,000	

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

Perhitungan PPh 21 uang lebur merupakan tambahan upah yang dibayarkan karena pekerja telah menambah jam kerja dari jam kerja normal yang ditentukan. Merekap perhitungan uang lembur dicatat sesuai dengan bagian kerja pegawai.

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPh 21 uang lembur :

a. Membuat Sheet pada MrExcel sesuai dengan bagian kerja pegawai.
b. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama, jabatan, tarif potongan pajak, NPWP dan keterangan lain-lain praktikan dapat mengambil dari file yang telah di berikan oleh pembimbing.
c. Menyesuaikan tarif potongan pajak yang ada pada lembar kertas dengan lembar kerja.

Tabel 3.3 Rekap PPh 21 Uang Lembur

	Tahun Paja	Pembetularor	Bukti Pc	NIP	NPWP	NIK	Nama	Alamat	Gol	Kegiatan	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Tarif	Jumlah PPh	WP Pemo
2	2016	0	1	196110091993032001	477990519411000	367404491060005			IV/b		21-402-01	976000	15	146400	
3	2016	0	2	196901221999031002	478051717061000	3174082201690003			III/d		21-402-01	1094000	5	54700	
4	2016	0	3	196308281983031003	477991723043000	3674032808630003			III/d		21-402-01	813000	5	40650	
5	2016	0	4	197203221996031001	478051865064000	3174072203720003			III/c		21-402-01	149000	5	7450	
6	2016	0	5	196801031991021001	477990592404000	3201200301680001			III/c		21-402-01	332000	5	16600	
7	2016	0	6	197705301998031004	477987754413000	3216013005770003			III/a		21-402-01	0	5	0	
8	2016	0	7	197006281996031002	477988463403000	3201112806700001			II/d		21-402-01	847000		0	
9	2016	0	8	198110032008102001	793692567035000	3173054310810005			II/b		21-402-01	151000		0	
10	2016	0	9	197206161998031004	477988935411000	3674031606720004			II/d		21-402-01	733000		0	
11												5095000		265800	

Polda Apr | Perjalanan Apr | Acara Apr | Set TU Ketua DPR Mar | Set TU Ketua DPR Apr | MKD Apr | SET. KOM VIII

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

Perhitungan PPh 21 progresif merupakan gaji untuk pegawai tidak tetap. pengenaan tarif potongan pajak untuk pegawai tidak tetap 5% dari DPP (dasar pengenaan pajak).

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPh 21 progresif :

a. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama dan keterangan lain-lain praktikan dapat mengambil dari file yang telah di berikan oleh pembimbing.
b. Mengisi kolom gaji kotor
c. Mengisi kolom jumlah DPP
d. Menghitung jumlah potongan pajak yang dikenakan

Tabel 3.4 Rekap PPh 21 Progresif atau PTT (Pekerja Tidak Tetap)

1	Pembetul	Nama	Nomor Bukti Potong	NPWP	NIK	Nama	Alamat	WP Luar Negeri	Kodi	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah DPP	Tanpa N	Tarif	Jumlah PPh	NPWP Pe	Nama Pemotong	Tang
119	118	SUTRISNO	1.3-03.16-0000247	000000000000000	-	SUTRISNO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
120	119	NASITA	1.3-03.16-0000248	000000000000000	-	NASITA		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
121	120	BURHANUDIN	1.3-03.16-0000249	000000000000000	-	BURHANUDIN		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
122	121	DWI HERMANTO	1.3-03.16-0000250	000000000000000	-	DWI HERMANTO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
123	122	LUKAS RUMBIAK	1.3-03.16-0000251	000000000000000	-	LUKAS RUMBIAK		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
124	123	HERU KISWANTO	1.3-03.16-0000252	000000000000000	-	HERU KISWANTO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
125	124	SIGIT SURELANWANTO	1.3-03.16-0000253	000000000000000	-	SIGIT SURELANWANTO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
126	125	KUNRITA	1.3-03.16-0000254	000000000000000	-	KUNRITA		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
127	126	TOMO SUANTO	1.3-03.16-0000255	000000000000000	-	TOMO SUANTO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
128	127	ACHMAD ROHADI	1.3-03.16-0000256	000000000000000	-	ACHMAD ROHADI		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
129	128	WARAS WINARNO	1.3-03.16-0000257	000000000000000	-	WARAS WINARNO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
130	129	DEDI SUKARNO	1.3-03.16-0000258	000000000000000	-	DEDI SUKARNO		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
131	130	MARULAK PAPAHAN	1.3-03.16-0000259	000000000000000	-	MARULAK PAPAHAN		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
132	131	FAJAR KURNIAWAN	1.3-03.16-0000260	000000000000000	-	FAJAR KURNIAWAN		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
133	132	MULYADI	1.3-03.16-0000261	000000000000000	-	MULYADI		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
134	133	HARNIZON	1.3-03.16-0000262	000000000000000	-	HARNIZON		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
135	134	SUGIYANTO	1.3-03.16-0000263	000000000000000	-	SUGIYANTO		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
136	135	JAMINGAN	1.3-03.16-0000264	000000000000000	-	JAMINGAN		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
137	136	DENI KOHARUDIN	1.3-03.16-0000265	000000000000000	-	DENI KOHARUDIN		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
138	137	HERYANTO	1.3-03.16-0000266	000000000000000	-	HERYANTO		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
139	138	FERIANA FUAD	1.3-03.16-0000267	000000000000000	-	FERIANA FUAD		N		21-100-03	Rp		N	5	Rp -	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
140	139	DODI HAYONO	1.3-03.16-0000268	000000000000000	-	DODI HAYONO		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
141	140	DITO PRADITA	1.3-03.16-0000269	000000000000000	-	DITO PRADITA		N		21-100-03	Rp	Rp 390,000	N	5	Rp 19,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
142	141	RACHMAN DITA	1.3-03.16-0000270	000000000000000	-	RACHMAN DITA		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
143	142	RIDWAN WAHYU K	1.3-03.16-0000271	000000000000000	-	RIDWAN WAHYU K		N		21-100-03	Rp	Rp 140,000	N	5	Rp 7,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
144	143	DRS. MASTUR PRANTONO	1.3-03.16-0000037	876770272086000	-	DRS. MASTUR PRANTONO		N		21-100-03	Rp	Rp 2,750,000	N	5	Rp 137,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
145	144	RAHAYU SETIOWATI	1.3-03.16-0000038	684549330432000	-	RAHAYU SETIOWATI		N		21-100-03	Rp	Rp 1,150,000	N	5	Rp 57,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
146	145	SOFYAN EFENDI	1.3-03.16-0000039	710786557035000	-	SOFYAN EFENDI		N		21-100-03	Rp	Rp 1,150,000	N	5	Rp 57,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
147	146	MUHAMMAD HUSEN	1.3-03.16-0000040	889448925402000	-	MUHAMMAD HUSEN		N		21-100-03	Rp	Rp 1,150,000	N	5	Rp 57,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
148	147	MOEHAMAD ANDRI NURDIANSYAH	1.3-03.16-0000041	895362150017000	-	MOEHAMAD ANDRI NURDIANSYAH		N		21-100-03	Rp	Rp 650,000	N	5	Rp 32,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
149	148	NAEFUROJI	1.3-03.16-0000042	710997313035000	-	NAEFUROJI		N		21-100-03	Rp	Rp 400,000	N	5	Rp 20,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
150	149	ANDI MUHAMAD ILHAM. L	1.3-03.16-0000043	000000000000000	-	ANDI MUHAMAD ILHAM. L		N		21-100-03	Rp	Rp 765,000	N	5	Rp 38,250	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
151	150	JAKA NUGRAHA	1.3-03.16-0000044	731808382416000	-	JAKA NUGRAHA		N		21-100-03	Rp	Rp 265,000	N	5	Rp 13,250	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
152	151	SINGGIH KINANTI RIMBANI	1.3-03.16-0000045	728112889031000	-	SINGGIH KINANTI RIMBANI		N		21-100-03	Rp	Rp 900,000	N	5	Rp 45,000	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	
153	152	RIA NUR MEGA	1.3-03.16-0000046	000000000000000	-	RIA NUR MEGA		N		21-100-03	Rp	Rp 350,000	N	5	Rp 17,500	70187438	AGUS SUTARI, S.SOS	

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi. 2011:271)

Praktikan bertugas merekap PPh pasal 22, transaksi PPh 22 meliputi kegiatan pembayaran belanja pada Sekretariat Jenderal DPR RI seperti pembelian cat untuk perawatan gedung, pembelian mobil dinas untuk pegawai, pembelian meja untuk kegiatan rapat, dan lain-lain. Tarif potongan pajak sebesar 15% dari nilai obyek pajak.

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPh pasal 22 :

a. Memfotocopy SSP (surat setoran pajak) PPh pasal 22

b. Mengisi kolom NPWP pada lembar kerja

c. Mengisi kolom nama Wajib Pajak

d. Mengisi kolom tanggal SPM

e. Mengisi kolom Nilai Obyek Pajak

f. Mengisi kolom nomor BKU

g. Memeriksa hasil potongan pajak yang dikenasan pada lembar kerja dengan lembar kertas

Tabel 3.5 Rekap PPh pasal 22

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22

Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 6

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)		
			Nomor	Tanggal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	74.993.418.8.039.000	PT. PLANET TRIJAYA UTAMA	001/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		2,529,900	0,015	001 4154T
2	01.822.829.6.631.000	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	002/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		6,024,937	0,015	002 8703T
3	66.623.166.7.034.000	PT. MEGATAMA CITRA LESTARI	003/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		2,575,950	0,015	003 4157T
4	03.098.936.2.027.000	PT. BANGUN DWI PUTRA SEJATI	004/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		2,580,000	0,015	004 4159T
5	31.672.940.9.024.000	PT. DAMAI PUTRA ARINDO	005/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		1,201,707	0,015	005 6414T
6	31.182.939.4.002.000	CV. FAJAR MANDIRI	006/SETJEN-22/07-LS/2016	6/29/2016		1,994,925	0,015	006 4162T
7	02.305.870.4.085.000	CV. ADHI MAKMUR	007/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		635,485	0,015	007 2526T
8	31.384.388.0.432.000	CV. G TECHNOLOGY	008/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		2,492,234	0,015	008 2528T
9	31.672.940.9.024.000	PT. DAMAI PUTRA ARINDO	009/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		968,584	0,015	009 6413T
10	74.750.947.9.001.000	PT. ARTHA TAMA TRIPRANATA	010/SETJEN-22/07-LS/2016	6/28/2016		2,647,500	0,015	010 9645T
11	03.098.758.0.027.000	CV. DELTA ARTHA UTAMA	011/SETJEN-22/07-LS/2016	6/27/2016		1,369,200	0,015	011 4146T
12	02.508.613.3.008.000	PT. SYIFA KARUNIA ABADI	012/SETJEN-22/07-LS/2016	7/1/2016		2,665,883	0,015	012 6402T

SPT DEWAN | SPT SEKRET | spt induk | (BP) PPH 22 | FEB | MARET | APRIL | SPT SEKRET APRIL | MEI | SPT SEKRET MEI | JUNI | SPT SEKRET JUNI | JULI | SPT SEKRET JULI | DES S 2015

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

4. Rekapitulasi Perhitungan PPh 23

Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2010:273)

Praktikan bertugas merekap PPh pasal 23 yang sebagian besar transaksi dari pembayaran atas jasa yang dilakukan seperti catering untuk menyuguhkan makanan pada setiap kegiatan, iklan baik media cetak, televisi dan online yang termasuk dalam kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI, pengadaan pengamanan, dan lain-lainnya. Tarif potongan Pajak yang di kenakan 2% dari nilai obyek pajak.

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPh pasal 23 :

a. Memfotocopy SSP PPh pasal 23
b. Mengisi kolom NPWP dan nama wajib pajak berdasarkan nomor BKU dan dapat di ambil pada file PPh 22 atau PPN
c. Mengisi kolom tanggal SPM
d. Mengisi kolom Nilai Obyek Pajak
e. Mengisi kolom nomor BKU
f. Memeriksa hasil potongan pajak yang dikenakan

Tabel 3.6 Rekap PPh 23

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Masa Pajak 0 6 / 2 0 1 6

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)			
			Nomor	Tanggal					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
A. PPH PASAL 23									
1	01.899.675.1.027.000	PT. SARANA SOLUSINDO PRIMA	001/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		949,879	0.02	001	4111T
2	01.308.554.3.076.000	PT. SETRA SARI	002/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		8,573,148	0.02	002	2401T
3	01.339.861.5.016.000	PT. GEMINI INDOPESCO	003/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		8,586,061	0.02	003	2423T
4	01.888.731.5.001.000	PT. CEMPAKA ADHI JAYA	004/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		7,158,564	0.02	004	2405T
5	02.963.570.3.086.000	CV. DIYAN TIRTAYASA	005/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		135,518	0.02	005	4108T
6	01.899.675.1.027.000	PT. SARANA SOLUSINDO PRIMA	006/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		874,000	0.02	006	4109T
7	02.553.953.7.025.000	CV. HASANAH	007/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		3,139,439	0.02	007	4113T
8	02.963.570.3.086.000	CV. DIYAN TIRTAYASA	008/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		2,574,845	0.02	008	4107T
9	02.553.953.7.025.000	CV. HASANAH	009/SETJEN-23/06-LS/2016	6/3/2016		165,234	0.02	009	4114T

SPT SEKRET | SPT DEWAN | INDUK SPT | JAN | FEB | MARET | APRIL | SPT SEKRET APRIL | MEI | SPT SEKRET MEI | JUNI | SPT SEKRET JUNI | JULI | SPT SEKRET JULI | DES S 2015

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

5. Rekapitulasi Perhitungan PPN

PPN (pajak pertambahan nilai) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji.2000 :22)

Praktikan bertugas merekap PPN, Pencatatan dan penghitungan PPN di dapat dari pajak pertambahan nilai PPh 22 dan PPh 23. Tarif potongan pajak atau DPP (dasar pengenaan pajak) yang dikenakan 10% dari PPN.

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi perhitungan PPN :

a. Memfotocopy SSP PPN

b. Mengisi kolom Nama Rekan

c. Mengisi kolom NPWP rekan

d. Mengisi kolom PPN

e. Mengisi kolom BKU

f. Menyesuaikan hasil DPP yang ada pada lembar kerja dengan lembar kertas.

Berikut ini PPN yang potongan Pajaknya di pungut oleh KPPN. PPN ini di dapat dari transaksi Pajak langsung karna penerimaan dan penyetoran pajaknya dari KPPN.

Tabel 3.7 Rekap PPN dipotong oleh KPPN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL

LAMPIRAN 1

AR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak 0 7 s.d. 0

Pembetulan Ke- : ...0... (NOL)

FORMULIR 1107

PUT 1

NAMA PEMUNGUT SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI

NPWP 70,026,457,5,077,000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupia	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPn BM		
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN													
1	PT. PP PRACETAK	01.347.368.1.007.000	-	-	-	858,033,550	--,---,---	0	6/28/2016		0	0,10	2500T
2	PT. NUSANTARA CARD SEMESTA	01.680.286.0.038.000	-	-	-	1,239,000,000	--- --- ---	0	6/28/2016		0	0,10	8697T
3	PT. PLANET TRIJAYA UTAMA	74.993.418.8.039.000	-	-	-	168,660,000		0	6/28/2016		0	0,10	4154T
4	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	01.822.829.6.631.000	-	-	-	401,662,500		0	6/28/2016		0	0,10	8703T
5	PT. MEGATAMA CITRA LESTARI	66.623.166.7.034.000	-	-	-	171,730,000		0	6/28/2016		0	0,10	4157T

SPT DEWAN | SPT SEKRET | induk spt | JAN | 1107 PUT 2 | FEB | MARET | APRIL | SPT SEKRET APRIL | MEI | SPT SEKRET MEI | JUNI | SPT SEKRET JUNI | JULI | SPT SEKRET JUL

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

Berikut ini PPN yang potongan pajaknya di pungut oleh bendahara pengeluaran. PPN ini di dapat dari transaksi pajak GU karena penerimaan dan penyetoran pajaknya dari Bendahara pengeluaran yang ada pada bagian kas dan pembukuan.

Tabel 3.8 Rekap PPN dipotong oleh bendahara

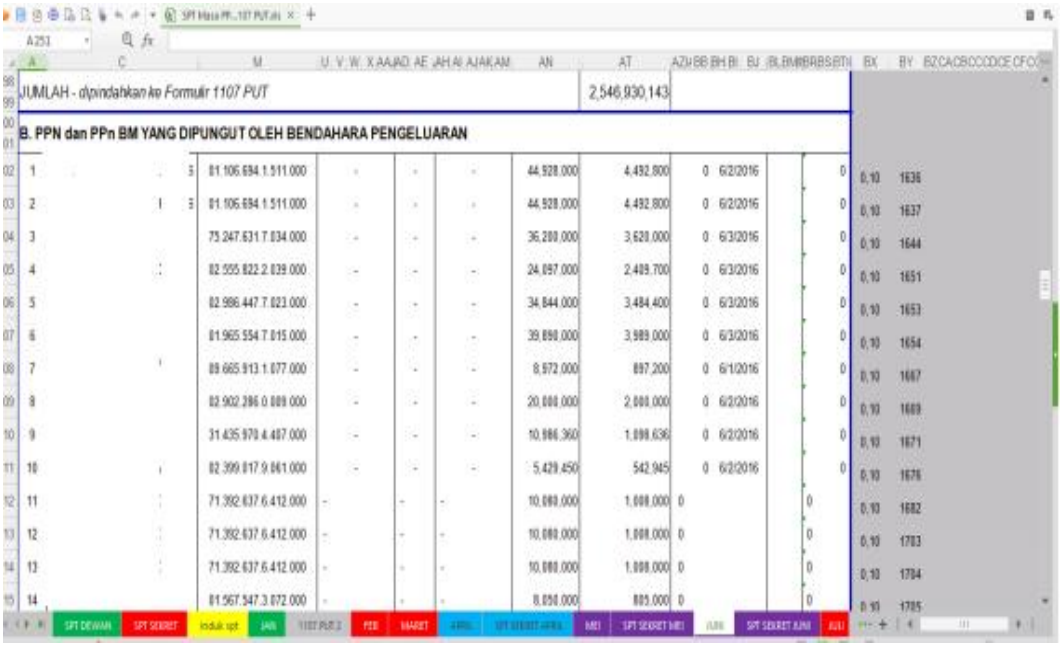

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 2,546,930,143

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

1		01.106.694.1.511.000	-	-	-	44.928.000	4.492.800	0	6/2/2016		0	0,10	1636
2		01.106.694.1.511.000	-	-	-	44.928.000	4.492.800	0	6/2/2016		0	0,10	1637
3		75.247.631.7.034.000	-	-	-	36.200.000	3.620.000	0	6/3/2016		0	0,10	1644
4		02.555.822.2.039.000	-	-	-	24.097.000	2.409.700	0	6/3/2016		0	0,10	1651
5		02.986.447.7.023.000	-	-	-	34.844.000	3.484.400	0	6/3/2016		0	0,10	1653
6		01.965.554.7.015.000	-	-	-	39.890.000	3.989.000	0	6/3/2016		0	0,10	1654
7		09.665.913.1.077.000	-	-	-	8.972.000	897.200	0	6/1/2016		0	0,10	1667
8		02.902.286.0.089.000	-	-	-	20.000.000	2.000.000	0	6/2/2016		0	0,10	1669
9		31.435.970.4.487.000	-	-	-	10.986.360	1.098.636	0	6/2/2016		0	0,10	1671
10		02.399.017.9.061.000	-	-	-	5.429.450	542.945	0	6/2/2016		0	0,10	1676
11		71.392.637.6.412.000	-	-	-	10.000.000	1.000.000	0			0	0,10	1682
12		71.392.637.6.412.000	-	-	-	10.000.000	1.000.000	0			0	0,10	1783
13		71.392.637.6.412.000	-	-	-	10.000.000	1.000.000	0			0	0,10	1784
14		01.567.547.3.072.000	-	-	-	8.050.000	805.000	0			0	0,10	1785

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016

6. Merapihkan Dokumen Penerimaan dan Penyetoran GU

Selain merekap pajak praktikan membantu pembimbing untuk merapihkan dokumen-dokumen penerimaan dan penyetoran pajak GU. Pajak GU merupakan pajak ganti uang atau pajak tidak langsung. Pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain sepetri PPN (Ambarita, Erik Manson. 2009). Jika pajak langsung pembayarannya langsung dibayarkan kepada pihak ketiga maka berbeda dengan GU yang pembayarannya melalui bagian Bendahara Keuangan. Nominal permintaan pembayaran pajak GU

biasanya kurang dari Rp. 50.000.000,00 jadi pemintaan pembayaran tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Bendahara sampai permintaan pembayaran mencapai lebih dari 50.000.000,00. Jika permintaan pembayaran tersebut sudah lebih dari nominal yang di tentukan maka Bendahara akan mengajukan permintaan uang ke KPPN untuk pencairan uang. Lalu Bendahara akan bembayarkan permintaan pembayaran secara cash atau via Bank. Selain itu jika pajak langsung pembayaran pajaknya langsung di potong oleh negara maka GU pajaknya dipotong oleh bendahara jadi dari tiap transaksi tersebut bendahara akan menghitung pajak yang dpotong dan nantinya Bendahara yang membayarkan potongan pajak tersebut.

Berikut ini beberapa tahapan dalam merapihkan dokumen penerimaan dan penyetoran pajak GU:

a. SSP pajak GU yang telah difotocopy dan telah di catat datanya akan di taruh di file untuk diambil oleh pihak yang membutuhkan data tersebut.
b. Untuk data yang asli akan di simpan dan di kelompokan sehingga menjadi dokumen-dokumen
c. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi arsip untuk pemeriksaan di akhir tahun.

7. Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan.

Praktikan diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana pengajuan pembayaran pajak langsung dan pengajuan surat untuk tambahan uang

pesediaan. Pengajuan surat atau dokumen dibawa ke kantor KPPN. Disana surat dan dokumen diperiksa kelengkapan dan kebenaran sesuai dengan data softcopy yang dibawa. Jika didalam dokumen tersebut ada kekurangan atau kesalahaan dalam pencataan maka dokumen tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga permintaan pembayaran belum dapat dibayarkan. Selain itu ada juga batasan waktu untuk permohonan pembayaran. Jika dokumen permohonan yang di ajukan melebihi waktu tujuh hari maka permohonan itu akan di tolak sehingga harus membuat kembali surat permohonan pembayaran.

C. KENDALA

Selama menjalani masa PKL, kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah:

1. Dalam merekap penerimaan dan penyetoran pajak langsung kendala yang dihadapi oleh praktikan yaitu praktikan harus teliti dalam memasukan data, terutama pengisian tarif potongan pajak yang dikenakan. Selain itu tidak boleh terjadi kesalahan dalam pemberian nomor BKU pada lembar kertas karna nomor BKU sangat lah penting.
2. Dalam merekap PPh pasal 21 kendala yang dihadapi oleh peraktikan yaitu sistem yang digunakan masih manual menggunakan Mr.Excel sedangkan jumlah karyawan yang banyak dan teransaksi yang banyak membuat data yang harus dihitung sangat menumpuk. Banyaknya data tidak diimbangi dengan sistem yang baik untuk memudahkan pekerjaan dan meminimalkan kesalahan.

3. Dalam merekap PPh pasal 22 praktikan harus benar dalam mengisi kolom obyek pajak karna jika dalam pengisian kolom tidak benar akan berpengauh pada tarif potongan pajak yang di kenakan.
4. Dalam merekap PPh pasal 23 kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah mengisi kolom NPWP dan nama Wajib Pajak berdasarkan nomor BKU karena pada lembar kertas SSP NPWP dan nama Wajib Pajak yang tertulis adalah milik bendahara pengeluaran DPR RI. Sehingga praktikan harus menggunakan nomor BKU pada file PPh pasal 22 atau PPN untuk mengisi kolom NPWP dan nama Wajib Pajak pada lembar kerja.
5. Dalam merekap PPN kendala yang di hadapi oleh praktikan adalah lembar kerja yang terbagi dua untuk yang dibayarkan oleh KPPN dan yang di bayarkan oleh Bendahara pengeluaran sehingga sedikit menyulitkan praktikan karna format kolom yang kurang dimengerti oleh praktikan.

D. PEMECAHAN MASALAH

Dari kendala yang telah disebutkan, maka praktikan sebisa mungkin berusaha untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan praktikan adalah:

1. Praktikan harus teliti dalam menuliskan nomor BKU bahkan pemeriksaan ulang saat penulisan akan memperkecil terjadinya kesalahan. Selain itu jika terjadi kesalahan yang kurang di mengerti oleh praktikan lebih baik bertanya kepada pembimbing dibandingkan dengan mengira-ngira untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

2. Praktikan harus teliti dalam memberikan nomor di kertas agar tidak terjadi kesalahan untuk memudahkan Praktikan mencatat data-data tersebut, lalu praktikan harus menghitung kembali dan menyesuaikan jumlah potongan setiap satu lembar kerta kerja agar tidak terjadi selisih pada akhir penjumlahan dan apabila terjadi kesalahan praktikan dapat mengkoreksi kesalahan dengan menyesuaikan pada kelompok lembar kerja.
3. Pemeriksaan kembali setiap kali praktikan menghitung tarif potongan pajak agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu mengisi kolom BKU sangat penting untuk mempermudah mencari transaksi jika di perlukan.
4. Praktikan harus selalu teliti dalam menulis nomor BKU karna akan mempermudah Praktikan untuk mengerjakan tugas yang di kerjakan.
5. Praktikan harus bertanya kepada pembimbing untuk belajar membuat format kolom sehingga setiap kali merekap PPn, Praktikan bisa membuat format kolom tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan PKL pada Sekretariat Jenderal DPR RI selama dua bulan, paktikan mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Praktik Kerja Lapangan telah memberikan banyak manfaat dan memberikan ilmu bagi beberapa pihak, yaitu mahasiswa sebagai praktikan, univrsitas sebagai lembaga pendidikan, dan Sekretariar Jenderal DPR RI sebagai Instansi terkait.
2. Praktik Kerja Lapangan ini memberikan peluang kerja bagi mahasiswa.
3. Selama pelaksanaan kegiatan PKL, Praktikan mendapatkan pengalaman dalam membantu untuk merekapitulasi perhitungan penerimaan dan penyetoran pajak langsung, Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, Merapihkan Dokumen Penerimaan dan Penyetoran GU dan Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan.
4. Praktkan telah memahami situasi dalam dunia kerja yang sesungguhnya pada saat melakukan PKL, pekerjaan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan ilmu teori yang dipelajari pada bangku perkuliahan.
5. Dalam melakukan PKL, praktikan memahami akan pentingnya tepat waktu saat mengerjakan tugas yang deadline, optimis bahwa Praktkan dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, komitmen, disiplin dengan waktu, dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam

setiap bidang yang ada pada instansi. Namun tidak hanya ilmu yan diperlukan didalam dunia kerja, namun *softskill* seperti kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan, karena sangat membantu dalam melaksanakan semua pekerjaan maupun dalam menjalin hubungan sosial yang baik antara rekan kerja pada instansi tersebut.

B. SARAN-SARAN

Dalam melaksanakan PKL pada instansi tersebut, praktikan menyadari bahwa terdapat kelebihan maupun kekurangan selama pelaksanaan. Beberapa saran yang dapat Praktikan berikan agar manfaat dan tujuan PKL dapat terujud dengan baik antara lain:

1. Bagi Mahasiswa atau Praktikan selanjutnya
   a. Pada masa praktikan melaksanakan PKL, sebaiknya praktikan tidak boleh merasa kurang prcaya diri dan praktikan tidak boleh segan-segan untuk selalu bertanya kepada karyawan lain atau pembimbing, hal ini dilakukan agar praktikan tahu pekerjaan dibagian lainnya dan informasi yang didapat praktian dapat dijadikan ilmu untuk kedepannya.
   b. Bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL, selain berbekal informasi tentang instansi atau perusahaan juga diharapkan untuk terus mngembangkan kemampuan dan keahliannya pada bidang akuntansi selama masa perkuliahan. Sehingga pada saat mahasiswa tersebut mulai merasakan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa tersebut memiliki bekal ilmu yang memadai sehingga dapat membantu mempermudah pada saat

mengerjakan tugas-tugas ditempat praktikan magang.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Jakarta
   a. Pihak Universitas dapat memberikan pembekalan secara ilmu dan sikap kepada setiap mahasiswa yang akan melaksanakan program PKL atau magang. Hal ini akan memberikan banyak manfaat kepada para mahasiswa yang akan memulai pelaksanaan PKL agar ara mahasiswa dapat memulai praktik atau magang secara optimal
   b. Pihak Universitas harus menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi atau perusahaan agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat terlaksana dengan baik
3. Bagi Perusahaan atau Instansi
   a. Perusahaan atau Instansi diharapkan untuk selalu menjaga kualitas hasil pekerjaan dan selalu membimbing praktikan dalam proses pekerjaan agar pekerjaan selesai dengan baik dari segi ketepatan dalam penyelesaian tugas-tugas.
   b. Peusahaan atau Instansi harusnya menempatkan mahasiswa praktik atau magang dengan bidang akademik yang dipelajari pada bangku perkuliahan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat maksimal dalam mempraktikan ilmu yang didapatnya selama di bangku perkuliahan.
   c. Kemampuan untuk memahami bidang kerja yang dikerjakan dan memberitahu kepada praktikan akan resiko yang terjadi apabila terjadi kesalahan, hal ini dilakukan agar praktkan ebih teliti dalam mengerjakan pekerjanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Ambarita, Erik Manson. (2009). "Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terhadap Efisiensi Pemungutan Pajak Indonesia". Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan public, Universitas Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta.

Resmi, 2011b. Perpajakan. Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Rusmanto, 2012. Peran Sekretariat Jederal DPR RI kepada DPR RI dalam pengujian udang-undang terhadap UU(D 1945: Universitas Indonesia. Jakarta.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Sukardji untung, 2000. Pajak Pertambahan Nilai, Rajawali Pers, Jakarta

Sekretariat Jenderal DPR RI. http://www.dpr.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampian 1

Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : **2351/UN39.12/KM/2016** **22 April 2016**
Lamp. : -
H a l : **Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan**

Yth. **Kepala Bagian Kepegawaian**
Setjen DPR - RI
Jakarta (5715.752)

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a	:	**Asri Mahyudi**
Nomor Registrasi	:	8335132400
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP	:	082113143389

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pada bulan Juni s.d Agustus 2016.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Drs. Syaifullah
NIP 195702161984031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Akuntansi

Lampiran 2

Surat Perizinan PKL

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : SJ/08183/SETJEN DPR RI/PL.02/5/2016 — 18 Mei 2016
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth. Kepala Biro Administrasi dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta
Kampus Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Membalas surat Saudara nomor: 2351/UN39.12/KM/2016, tanggal 22 April 2016, perihal Praktik Kerja Lapangan (PKL), dengan ini kami beritahukan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menerima mahasiswa Saudara, a.n :

Nama	:	Asri Mahyudi
Nomor Mahasiswa	:	8335132400
Program Studi	:	Akuntasi

untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 13 Agustus 2016.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP. 19600419 198803 2 001.

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Setjen DPR RI;
2. Karo Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR RI.

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai PKL

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor	:	SJ/13088/SETJEN DPR RI/PL.02/8/2016	12 Agustus 2016
Sifat	:	Biasa	
Derajat	:	Segera	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Telah Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	

Yth. Kepala Biro Administrasi dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta
Kampus Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Menunjuk surat Saudara nomor: 2351/UN39.12/KM/2016 tanggal 22 April 2016, perihal Praktik Kerja Lapangan (PKL), dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara, yaitu :

Nama : Asri Mahyudi
Nomor Induk : 8335132400
Program Studi : Akuntasi

Telah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP. 19600419 198803 2 001.

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Karo Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR RI.

Lampiran 4

Sertifikat PKL

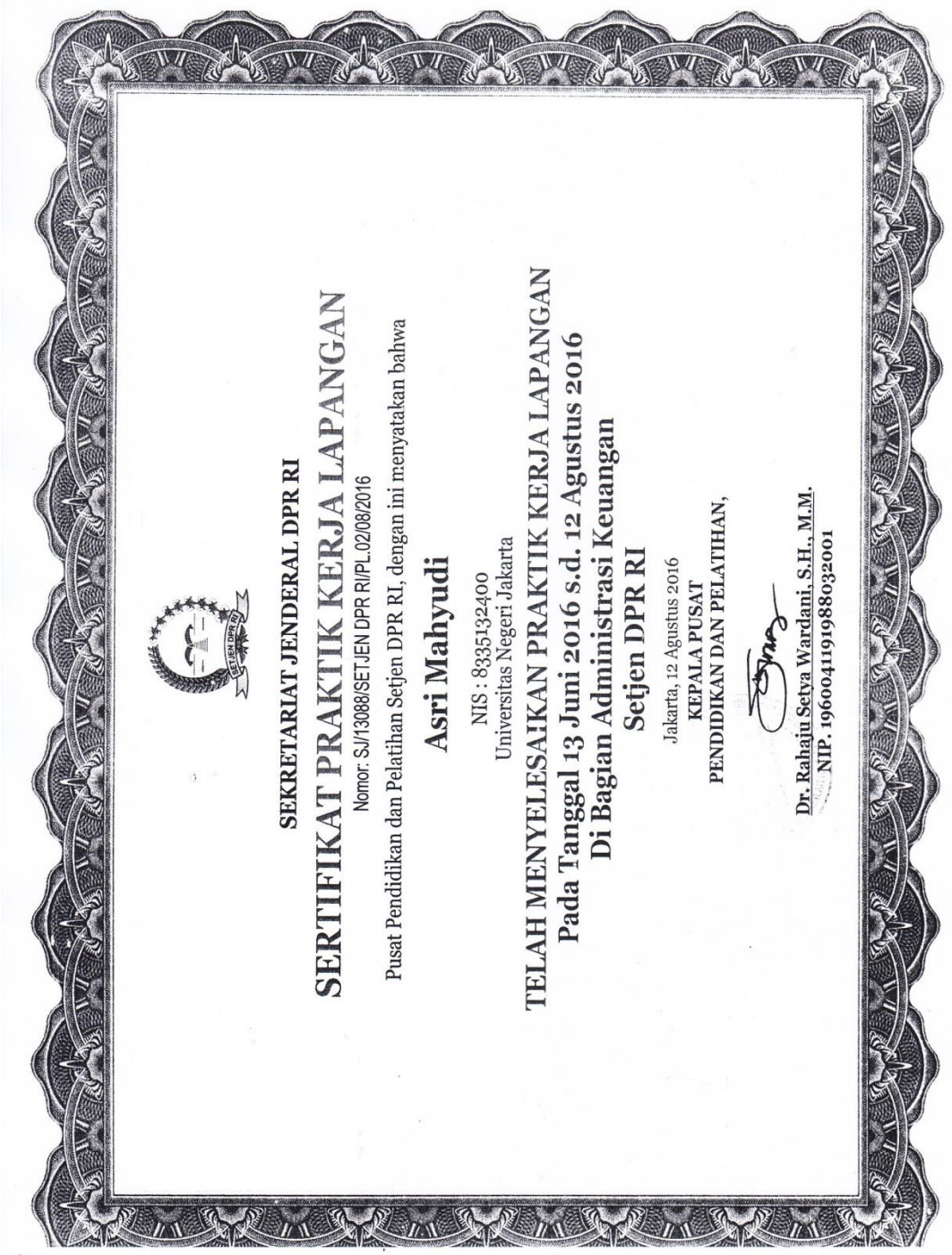

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SERTIFIKAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nomor: SJ/13088/SETJEN DPR RI/PL.02/08/2016

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI, dengan ini menyatakan bahwa

Asri Mahyudi

NIS : 8335132400

Universitas Negeri Jakarta

TELAH MENYELESAIKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pada Tanggal 13 Juni 2016 s.d. 12 Agustus 2016

Di Bagian Administrasi Keuangan

Setjen DPR RI

Jakarta, 12 Agustus 2016

KEPALA PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

NIP. 196004119198803 2001

Lampiran Penilaian

N a m a : Asri Mahyudi
Nomor Induk Siswi : 8335132400
Tempat Praktek Kerja Lapangan : Bagian Administrasi Keuangan Setjen DPR RI
Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan – Jakarta 10270

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kehadiran	**99**	**A**
2	Kedisiplinan	**97**	**A**
3	Sikap dan Kepribadian	**98**	**A**
4	Kemampuan Dasar	**97**	**A**
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	**97**	**A**
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	**97**	**A**
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	**98**	**A**
8	Aktifitas dan Kreatifitas	**98**	**A**
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	**98**	**A**
10	Hasil Pekerjaan	**98**	**A**
TOTAL NILAI		**977**	
Rata-rata		**97,7**	**A**

Nilai A = ≥ 80 – 100
Nilai B = 70,00 – 79,99
Nilai C = 60,00 – 69,99
Nilai D = 46,00 – 59,99
Nilai E = ≤ 46,00

Lampiran 5

Lembar Penilaian PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe

Building Future Leaders

ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO: IAS/INA/3640

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
..... SKS

Nama : Asri Mahyudi
No.Registrasi : 8335132400
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Sekretariat Jendral DPR RI
Alamat Praktik/Telp : .....

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN
1	Kehadiran	99	1.Keterangan Penilaian :
2	Kedisiplinan	97	Skor / Nilai / Predikat 80-100 / A / Sangat baik
3	Sikap dan Kepribadian	98	70-79 / B / Baik 60-69 / C / Cukup
4	Kemampuan Dasar	97	55-59 / D / Kurang
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	97	2.Alokasi Waktu Praktik :
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	97	2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	98	Nilai Rata-rata :
8	Aktivitas dan Kreativitas	98	975 : 10 (sepuluh) = 97.5
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	98	
10	Hasil Pekerjaan	98	Nilai Akhir :
			Angka bulat / huruf
	Jumlah	.....	

Jakarta, 12 Agustus 2016
Penilai

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(.....)

Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6

Daftar Hadir PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe

ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO
IAS/INA/3640

Building Future Leaders

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..... SKS

Nama : Asri Mahyudi
No. Registrasi : 8335132400
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jend. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF		KETERANGAN
1	Senin, 13 Juni 2016	1....		
2	Selasa, 14 Juni 2016		2....	
3	Rabu, 15 Juni 2016	3....		
4	Kamis, 16 Juni2016		4....	
5	Jum'at, 17 Juni 2016	5....		
6	Senin, 20 Juni 2016		6....	
7	Selasa, 21 Juni 2016	7....		
8	Rabu, 22 Juni 2016		8....	
9	Kamis, 23 Juni 2016	9....		
10	Jumat, 24 Juni 2016		10....	
11	Senin, 27 Juni 2016	11....		
12	Selasa, 28 Juni 2016		12....	
13	Rabu, 29 Juni 2016	13....		
14	Kamis, 30 Juni 2016		14....	
15	Jumat, 1 Juli 2016	15....		
16	Senin, 4 Juli 2016		16....	LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI
17	Selasa, 5 Juli 2016	17....		LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI
18	Rabu, 6 Juli 2016		18....	LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI
19	Kamis, 7 Juli 2016	19....		LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI
20	Jumat, 8 Juli 2016		20....	LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI

Jakarta, 12 Agustus 2016
Penilai,

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(.....)

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe

Building Future Leaders

ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO: IAS/INA/3640

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..... SKS

Nama : Asri Mahyudi
No. Registrasi : 8335132400
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jend. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
21	Senin, 11 Juli 2016	1.....	
22	Selasa, 12 Juli 2016	2.....	
23	Rabu, 13 Juli 2016	3.....	
24	Kamis, 14 Juli 2016	4.....	
25	Jumat, 15 Juli 2016	5.....	
26	Senin, 18 Juli 2016	6.....	
27	Selasa, 19 Juli 2016	7.....	Izin
28	Rabu, 20 Juli 2016	8.....	
29	Kamis, 21 Juli 2016	9.....	
30	Jumat, 22 Juli 2016	10.....	
31	Senin, 25 Juli 2016	11.....	
32	Selasa, 26 Juli 2016	12.....	
33	Rabu, 27 Juli 2016	13.....	
34	Kamis, 28 Juli 2016	14.....	
35	Jumat, 29 Juli 2016	15.....	
36	Senin, 1 Agustus 2016	16.....	
37	Selasa, 2 Agustus 2016	17.....	
38	Rabu, 3 Agustus 2016	18.....	
39	Kamis, 4 Agustus 2016	19.....	
40	Jumat, 5 Agustus 2016	20.....	

Jakarta, 12 Agustus 2016
Penilai,

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(.....)

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe

Building Future Leaders

ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO
IAS/INA/3640

DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

..... SKS

Nama : Asri Mahyudi
No. Registrasi : 8335132400
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jend. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
41	Senin, 8 Agustus 2016	1.....	
42	Selasa, 9 Agustus 2016	2.....	
43	Rabu, 10 Agustus 2016	3.....	
44	Kamis, 11 Agustus 2016	4.....	
45	Jumat, 12 Agustus 2016	5.....	
		6.....	
		7.....	
		8.....	

Jakarta, 12 AGUSTUS 2016
Penilai

(.....)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 7

Log Harian PKL

LOG HARIAN
Asri Mahyudi (8335132400)
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI

Hari	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Keterangan
SENIN	13 JUNI 2016	Perkenalan karyawan di Administrasi Keuangan Sekjen DPR RI. Mendengarkan penjelasan tentang Struktur organisasi Administrasi keuangan dan kegiatan kejra di bagian kas pembukuan. Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan April 2016.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SELASA	14 JUNI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan April 2016. Mencatat kelengkapan No.Kwitansi Karwas.	Ada yang Pekerjaan tertunda
RABU	15 JUNI 2016	Mencatat kelengkapan No.Kwitansi Karwas. Tugas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat kontrak serta faktur Pajak perusahaan untuk dibayarkan.	Selesai dikerjakan
KAMIS	16 JUNI 2016	Memfotocopy, Memisahkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang Asli dengan Hasil fotocpy. Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Dewan Bulan Juni 2016.	Ada yang Pekerjaan tertunda
JUMAT	17 JUNI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Dewan Bulan Juni 2016.	Selesai dikerjakan
SENIN	20 JUNI 2016	Menyusun Transaksi Penerimaan dan Penyetoran GU. Memfotocopy, Memisahkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang Asli dengan Hasil fotocpy, serta Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juni 2016.	Selesai dikerjakan
SELASA	21 JUNI 016	Menyusun dan Melengkapi Faktur Pajak, PPH 21, PPH 22, PPH 23, dan PPN. Mencatat Transaksi PPH 22, PPH 23, dan PPN.	Selesai dikerjakan
RABU	22 JUNI 2016	Mencatat Transaksi PPH21 .	Ada yang Pekerjaan tertunda
KAMIS	23 JUNI 2016	Mencatat Transaksi PPH21 .	Selesai dikerjakan
JUMAT	24 JUNI 2016	Mencatat Transaksi PPH21 UANG LEMBUR	Ada yang Pekerjaan tertunda
SENIN	27 JUNI 2016	Mencatat Transaksi PPH21 UANG LEMBUR	Selesai dikerjakan
SELASA	28 JUNI 2016	Menyusun berkas GU sesuai surat membayar	Selesai dikerjakan
RABU	29 JUNI 2016	Pemeriksaan berkas GU dan Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juni 2016.	Selesai dikerjakan
KAMIS	30 JUNI 2016	Mencatat transaksi PPH 22, PPH 23, PPN.	Selesai dikerjakan
JUMAT	1 JULI 2016	Tugas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk Memberikan surat kontrak serta faktur pajak perusahaan untuk dibayarkan. Mencatat Transaksi PPh21 Uang Lembur, PPH22, PPH 23, dan PPN	Selesai dikerjakan
SENIN	4 JULI 2016	LIBUR IDUL FITRI	
SELASA	5 JULI 2016	LIBUR IDUL FITRI	
RABU	6 JULI 2016	LIBUR IDUL FITRI	
KAMIS	7 JULI 2016	LIBUR IDUL FITRI	
JUMAT	8 JULI 2016	LIBUR IDUL FITRI	
SENIN	11 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 21 UANG LEMBUR.	Selesai dikerjakan
SELASA	12 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 23 dan PPH 21 .	Selesai dikerjakan
RABU	13 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 21 UANG LEMBUR, PPH 22, PPH 23 dan PPN.	Selesai dikerjakan
KAMIS	14 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 21 dan Menyusun Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juni 2016.	Selesai dikerjakan
JUMAT	15 JULI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Mei 2016.	Ada yang Pekerjaan tertunda

SENIN	18 JULI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Mei 2016.	Selesai dikerjakan
SELASA	19 JULI 2016	IZIN	
RABU	20 JULI 2016	Menyusun Surat Setoran Pajak (SSP) GU dan LS sesuai Nama Perusahaan.	Ada yang Pekerjaan tertunda
KAMIS	21JULI 2016	Menyusun Surat Setoran Pajak (SSP) GU dan LS sesuai Nama Perusahaan.	Selesai dikerjakan
JUMAT	22 JULI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juni 2016.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SENIN	25 JULI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juni 2016. Mencatat Transaksi PPH 22, PPH 23, dan PPN.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SELASA	26 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPh 22, PPH 23, dan PPN.	Ada yang Pekerjaan tertunda
RABU	27 JULI 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juli 2016 dan Menyusun Karwas GU.	Selesai dikerjakan
KAMIS	28 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 22, PPH 23, dan PPN.	Selesai dikerjakan
JUMAT	29 JULI 2016	Mencatat Transaksi PPH 23 dan PPH 21.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SENIN	1 AGUSTUS 2016	Mencatat PPH 21 .	Selesai dikerjakan
SELASA	2 AGUSTUS 2016	Mencatat PPH 21 Progresif.	Selesai dikerjakan
RABU	3 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 22, PPH23 , dan PPN.	Selesai dikerjakan
KAMIS	4 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Juli 2016.	Selesai dikerjakan
JUMAT	5 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 21.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SENIN	8 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 21.	Ada yang Pekerjaan tertunda
SELASA	9 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 21.	Selesai dikerjakan
RABU	10 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 21.	Selesai dikerjakan
KAMIS	11 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi PPH 21 Lembur dan Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Agustus 2016.	Ada yang Pekerjaan tertunda
JUMAT	12 AGUSTUS 2016	Mencatat Transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pajak LS Setjen Bulan Agustus 2016.	Selesai dikerjakan

Jakarta, 12 Agustus 2016
Penilai,

(.....)

Lampiran 8

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

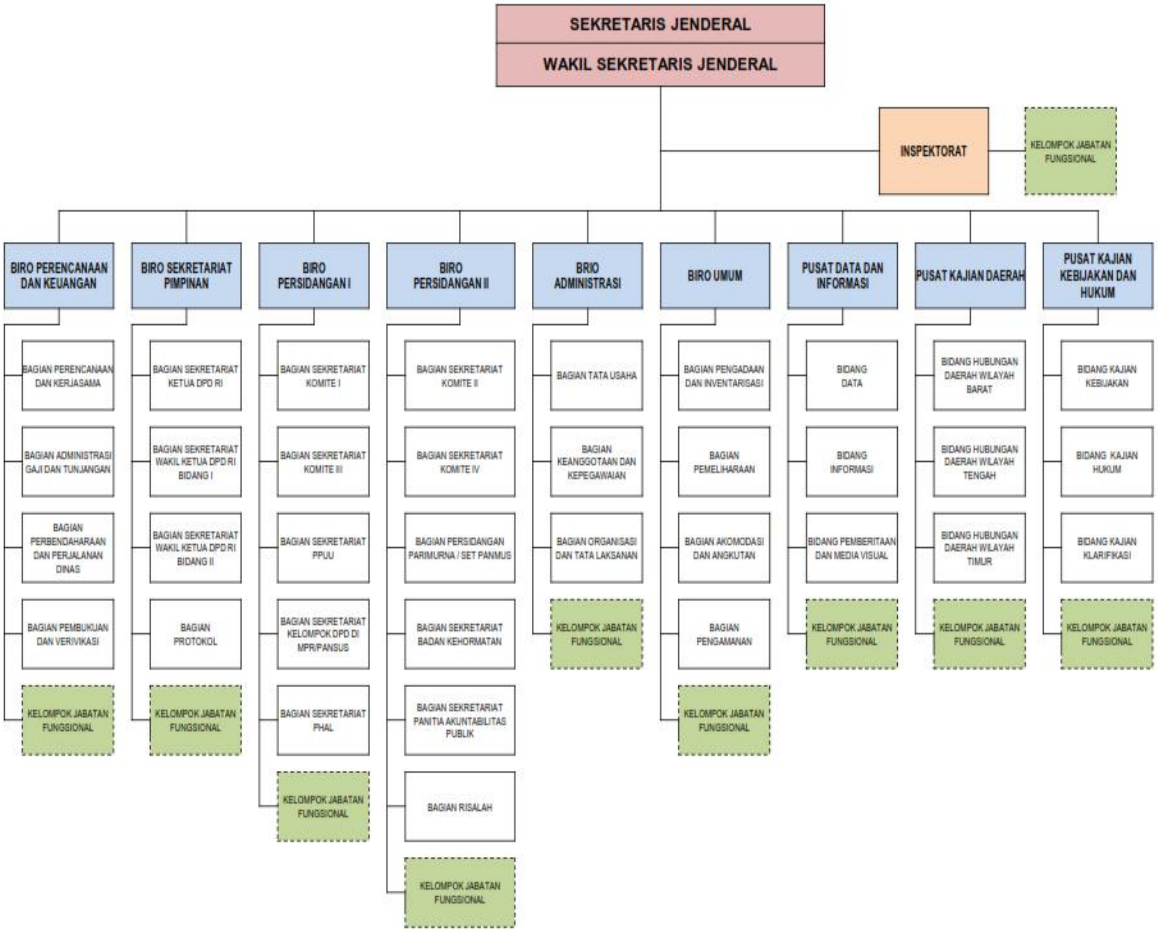

Lampiran 9

Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN JAKARTA VII

LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

TANGGAL : s/d 13-06-2016

7474

SATKER : SEKRETARIAT JENDERAL - 001012

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	16182130101224	03-06-2016	03-06-2016	153,000,000	040997/001012/2016	02-06-2016	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI SP NO 521811/SP/BKOMP.041/09/LP/IV/ 2016 TANGGAL 18 APRIL 2016 BAST NO 521811/BASP/BKOMP.041/11/LP/V/2016 TANGGAL 9 MEI 2016 BAP 521811/BAP/BKOMP.041/12/LP/V/2016 TANGGAL 9 MEI 2016
GRAND TOTAL				153,000,000					

Hal : 1/1

Dicetak : 2016-06-13 16:04:06

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 02-06-2016 Nomor : 04099

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII (182)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 153.000.000,-

SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2016

Dasar Pembayaran
UU APBN NO. 14 TAHUN 2015
(01) DIPANo. DIPA-002.01.1.001012/2016
TANGGAL 07-12-2015 REV.2
NO.DIPA-002.01.1.001012/2016

Satker	Kewenangan	Nama Satker
001012	KP	SEKRETARIAT JENDERAL

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
01 01 002 01 01
Kegiatan, Output, Lokasi
5791 994 01.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	168.300.000,-	015.04.01.51.411211.560930	15.300.000,-
Jumlah Pengeluaran	168.300.000,-	Jumlah Potongan	15.300.000,-
		Rp.	153.000.000,-

Kepada : CV. Sinar Mutiara Jl. Kamp. Baru No. 4 Rt. 005/007 Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakbar

NPWP : 02.066.164.1-035.000
Rekening : 019301001891300 (CV SINAR MUTIARA)
Bank/Pos : Bank BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru
Uraian : PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI SP NO 521811/SP/B.KOMP.041/09/LP/IV/ 2016 TANGGAL 18 APRIL 2016 BAST NO 521811/BASP/B.KOMP.041/11/LP/V/2016 TANGGAL 9 MEI 2016 BAP 521811/BAP/B.KOMP.041/12/LP/V/2016 TANGGAL 9 MEI 2016

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

293 403 589 4-4 099

JAKARTA, 2 JUNI 2016
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

Satyanto Priambodo, SE, M.Si
NIP. 196610081994031003

sn : r_rspp

Lampiran 10

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21

N KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

No : .....

Nama Wajib Pajak : INOSENTIUS SAMSUL

N P W P : 47.799.027.9-411.000

A l a m a t : Binong Permai, Binong, Curug Tangerang

Penghasilan		Jumlah	Tarip		PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp,	2.000.000	15 %	Rp.	300.000
2. Imbalan lainnya	: Rp,	-	- %	Rp.	-
					300.000
			Jumlah	Rp.	

Jakarta, 28 Juni 2016

.....20.....

Perhatian :

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

Pemotongan Pajak :

N a m a : Bendahara Peng Satker Setjen

N P W P : 70.026.457.5-077.000

cap dan
tanda tangan AGUS SUTARI, S.Sos.

NIP. 19650826 198703 1 002

2. PPh. 4A

MA : 002.01.01.5789.001.001.056A.521213

DAFTAR PEMBAYARAN HONOR TIM PENDAMPINGAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BULAN : MEI 2016
BERDASARKAN SK SEKJEN NO. 554 /SEKJEN/2016 TANGGAL 7 April 2016

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	BESAR HONOR	PPH	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	
1	DR. Winantuningtyastiti S.,M.Si	19540713 197503 1 002	IV	Pengarah	Rp 750.000	Rp 112.500	Rp 637.500	1	2
2	Achmad Djuned, SH, Mhum	19570911 198403 1 002	IV	Pengarah	Rp 750.000	Rp 112.500	Rp 637.500	3	4
3	Dra. Damayanti, Msi	19620211 198703 2 002	IV	Penanggung Jawab	Rp 700.000	Rp 105.000	Rp 595.000	5	6
4	Satyanto Priambodo, SE, Msi	19661008 199403 1 003	IV	Penanggung Jawab	Rp 700.000	Rp 105.000	Rp 595.000	7	8
5	Suryatna, SIP	19640824 198603 1 003	III	Ketua	Rp 700.000	Rp 35.000	Rp 665.000	9	10
6	Lisna Tjiptamanah SE	19601107 198803 2 001	III	Sekretaris	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	11	12
7	Dra. Sri Lestari, MM	19630728 198903 2 002	IV	Anggota	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 425.000	13	14
8	Djoko Prihandono, SE	19670224 198803 1 001	IV	Anggota	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 425.000	15	16
9	T a r y o n o	19611224 198203 1 002	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	17	18
10	Agus Sutari, S. Sos	19650826 198703 1 002	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	19	20
11	Dra. Rofiah	19650715 199603 2 004	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	21	22
12	Harry Budhi Hartanto, SE	19840804 200912 1 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	23	24
13	Puji Lestari, SE	19780626 199803 2 002	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	25	26
14	Kholip Wahyudi, S.Sos	19661005 199102 1 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	27	
15	Sam Karya Nugraha, SE	19880321 200912 1 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
16	Setiawan Sardjuwurjanto	19661212 198903 1 004	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
17	Agus Tating Suryasa	19590616 198603 1 004	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
18	Yulia Ditha Paramita, SE	19860711 200912 2 005	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
19	Suwarni, SE	19801019 200502 2 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
20	Iding, SE	19630823 198603 1 000	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
21	Rani Suwita, SE	19860625 200502 2 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
22	Boyke Agung Budi	19711207 199703 1 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
23	Gomas	19681111 198803 1 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
24	Dewi Resmini, SE, MSi	19710407 199203 2 001	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
25	Dewi Pusporini, ST, ME	19741211 19903 2 005	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
26	Kokom Komala S Sos	19730529 199903 2 004	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
27	Reti Ardiyanti, SE	19791126 200312 2 003	III	Anggota	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000		
	Jumlah Dipindahkan				Rp 14.600.000	Rp 1.120.000	Rp 13.480.000		

: HONORARIUM TENAGA PENGEMUDI PEGAWAI TIDAK TETAP SETJEN DPR RI
: KENDARAAN - BIRO UMUM SETJEN DPR RI
: MEI 2016

No. 69 /KEND/ 5 /2016
002.01.001012.01.51.01.5791.994.001.002B.521111
Belanja Keperluan Kantor

NO	NAMA	STATUS PERKAWINAN	NO SPK	TGL SK	HARI	UANG KEGIATAN SEBULAN	PTKP BULANAN	PKP BULANAN	PPH Ps.21 BULANAN 5%	JUMLAH UANG YANG DI TERIMA	TANDA TANGAN
1	ARIS BUDI ASTONO	TK/0	UM.00/2B/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,000,000	Rp 390,000	Rp 19,500	Rp 3,370,500	1
2	AGUNG WAHYU HANDOKO	K/2	UM.00/2A/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	2
3	AGUS SAPUTRO NUR ASLAM	TK/0	UM.00/15R/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,000,000	Rp 390,000	Rp 19,500	Rp 3,370,500	3
4	ANGGI RIYANTO	TK/0	UM.00/15T/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,000,000	Rp 390,000	Rp 19,500	Rp 3,370,500	4
5	APRISANDRATAMA	K/2	UM.00/15P/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	5
6	ARIF GINANJAR	K/0	UM.00/2T/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,250,000	Rp 140,000	Rp 7,000	Rp 3,383,000	6
7	ABDUL SOMAD	K/2	UM.00/15C/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	7
8	ASEP IRDIANSYAH	K/3	UM.00/15N/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 4,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	8
9	ASEP MULYADI	K/0	UM.00/15K/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,250,000	Rp 140,000	Rp 7,000	Rp 3,383,000	9
10	BARKAH HIDAYAT	K/0	UM.00/15M/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,250,000	Rp 140,000	Rp 7,000	Rp 3,383,000	10
11	DIDI SUPRIADI	K/2	UM.00/2C/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	11
12	DUDI KERTA MANGGALA	K/1	UM.00/2D/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,500,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	12
13	EDIN ZAINAL ABIDIN	K/2	UM.00/15F/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	13
14	ERWIN	TK/0	UM.00/2S/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,000,000	Rp 390,000	Rp 19,500	Rp 3,370,500	14
15	FERIYONIKA NABI	K/0	UM.00/2E/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,250,000	Rp 140,000	Rp 7,000	Rp 3,383,000	15
16	FITROH ABDUL MALIK	K/2	UM.00/2F/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	16
17	HASANUDIN	K/2	UM.00/15V/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	17
18	ISKANDAR ALMAKDUNI	K/2	UM.00/2G/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	18
19	JAMES SUMARDI WIDJAJA	K/1	UM.00/15U/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,500,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	19
20	JAYA	K/2	UM.00/15A/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	20
21	JOHAR WAHYUDI	K/2	UM.00/2H/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	21
22	JOKO PRIYANTO	K/2	UM.00/15/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	22
23	JUANDA	K/3	UM.00/2I/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	19	Rp 3,220,500	Rp 4,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,220,500	23
24	M. GIRI	K/3	UM.00/15J/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 4,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	24
25	MOHAMAD RIFKI	TK/0	UM.00/15X/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,000,000	Rp 390,000	Rp 19,500	Rp 3,370,500	25
26	MUHAMMAD IKHSAN	K/3	UM.00/2J/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 4,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	26
27	ODIH SUPRIYADI	K/2	UM.00/15G/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	27
28	OGI ARIYANTO	K/1	UM.00/15L/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,250,000	Rp 140,000	Rp 7,000	Rp 3,383,000	28
29	PAIDI	K/2	UM.00/2K/SETJENDPRRI/01/2016	5 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	29
30	RADI PERMANA	K/2	UM.00/15B/SETJENDPRRI/01/2016	7 JANUARI 2016	20	Rp 3,390,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,390,000	30

MA : 002.01.01.5785.001.001.054B.522191
BELANJA JASA LAINNYA

DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM
BAGI PEGAWAI/KARYAWAN KONTRAK BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN SETJEN DPR RI
BIRO : PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI
BULAN : JUNI 2016

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PERKAWINAN	NO SPK	JUMLAH TIDAK MASUK KERJA	JUMLAH	POTONGAN ALPA IDKHK*ALPA	JUMLAH KOTOR GAJI	PTKP BULANAN	PKP BULANAN	PPH PASAL 21 5%	JMLUANG YANG DITERIMA	TANDATANGAN
1	HELMI ADAM	PEMIMPIN REDAKSI	K/3	HP.03/003/001/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,750,000	0	8,750,000	4,000,000	4,750,000	237,500	8,512,500	1.
2	SYAHRONI	KOORDINATOR HARD NEWS	K/2	HP.03/003/002/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,750,000	4,250,000	212,500	7,787,500	2.
3	AGUS ROYADIN	KOORDINATOR PRODUKSI	K/1	HP.03/003/003/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,500,000	4,500,000	225,000	7,775,000	3.
4	JAKA SINDU	KOORDINATOR SCHEDULING & KREATIF	K/0	HP.03/003/004/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,250,000	4,750,000	237,500	7,762,500	4.
5	INUNG KUSDIARTI	KOORDINATOR MCR	K/2	HP.03/003/005/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	6,250,000	0	6,250,000	3,750,000	2,500,000	125,000	6,125,000	5.
6	YUSLIHAYANTI	PRESENTER SENIOR	K/1	HP.03/003/006/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,500,000	4,500,000	225,000	7,775,000	6.
7	DIDI MAHYUDI	KOODINATOR EDITING	K/0	HP.03/003/007/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	2	5,250,000	525,000	4,725,000	3,250,000	1,475,000	73,750	4,651,250	7.
8	WARJAN	ADVISER AUDIO&LIGHTING	K/3	HP.03/003/008/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	5,250,000	0	5,250,000	4,000,000	1,250,000	62,500	5,187,500	8.
9	REPLINA	EDITOR	K/1	HP.03/003/009/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,500,000	700,000	35,000	4,165,000	9.
10	MUZJATULLAH	KOODINATOR SOFT NEWS	K/2	HP.03/003/010/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	14	7,560,000	5,292,000	2,268,000	3,750,000	-	-	2,268,000	10.
11	NANDITA ERSIKA	PRESENTER JUNIOR	K/0	HP.03/003/011/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	6,150,000	0	6,150,000	3,250,000	2,900,000	145,000	6,005,000	11.
12	GUNARSO	STORAGE	K/3	HP.03/003/012/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,635,000	0	4,635,000	4,000,000	635,000	31,750	4,603,250	12.
13	FERDAUS GATOT.P	DESAIN GRAFIS SENIOR	K/1	HP.03/003/013/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	2	4,635,000	463,500	4,171,500	3,500,000	671,500	33,600	4,137,900	13.
14	HAPPY SUGIARTI	DESAIN GRAFIS JUNIOR	TK/0	HP.03/003/014/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,000,000	1,200,000	60,000	4,140,000	14.
15	ILLA RUSMAYADI	DESAIN GRAFIS JUNIOR	K/3	HP.03/003/104/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	15.
16	ROKHIM NUGRAHA	VJ SENIOR	K/1	HP.03/003/015/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,150,000	0	4,150,000	3,500,000	650,000	32,500	4,117,500	16.
17	CITRA ANANDA	MCR	K/0	HP.03/003/016/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,250,000	950,000	47,500	4,152,500	17.
18	NUFUS DWI OKTAVIANI	MCR	K/0	HP.03/003/017/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,250,000	950,000	47,500	4,152,500	18.
	JUMLAH DIPINDAHKAN					105,430,000	6,280,500	99,149,500			1,831,600	97,317,900	

MA : 002.01.01.5785.001.001.054B.522191
BELANJA JASA LAINNYA

DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM
BAGI PEGAWAI/KARYAWAN KONTRAK BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN SETJEN DPR RI
BIRO : PEMBERITAAN PARLEMEN DPR RI
BULAN : JUNI 2016

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PERKAWINAN	NO SPK	JUMLAH TIDAK MASUK KERJA	JUMLAH	POTONGAN ALPA IDKHK*ALPA	JUMLAH KOTOR GAJI	PTKP BULANAN	PKP BULANAN	PPH PASAL 21 5%	JMLUANG YANG DITERIMA	TANDATANGAN
1	HELMI ADAM	PEMIMPIN REDAKSI	K/3	HP.03/003/001/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,750,000	0	8,750,000	4,000,000	4,750,000	237,500	8,512,500	1.
2	SYAHRONI	KOORDINATOR HARD NEWS	K/2	HP.03/003/002/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,750,000	4,250,000	212,500	7,787,500	2.
3	AGUS ROYADIN	KOORDINATOR PRODUKSI	K/1	HP.03/003/003/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,500,000	4,500,000	225,000	7,775,000	3.
4	JAKA SINDU	KOORDINATOR SCHEDULING & KREATIF	K/0	HP.03/003/004/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,250,000	4,750,000	237,500	7,762,500	4.
5	INUNG KUSDIARTI	KOORDINATOR MCR	K/2	HP.03/003/005/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	6,250,000	0	6,250,000	3,750,000	2,500,000	125,000	6,125,000	5.
6	YUSLIHAYANTI	PRESENTER SENIOR	K/1	HP.03/003/006/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	8,000,000	0	8,000,000	3,500,000	4,500,000	225,000	7,775,000	6.
7	DIDI MAHYUDI	KOODINATOR EDITING	K/0	HP.03/003/007/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	2	5,250,000	525,000	4,725,000	3,250,000	1,475,000	73,750	4,651,250	7.
8	WARJAN	ADVISER AUDIO&LIGHTING	K/3	HP.03/003/008/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	5,250,000	0	5,250,000	4,000,000	1,250,000	62,500	5,187,500	8.
9	REPLINA	EDITOR	K/1	HP.03/003/009/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,500,000	700,000	35,000	4,165,000	9.
10	MUZJATULLAH	KOODINATOR SOFT NEWS	K/2	HP.03/003/010/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	14	7,560,000	5,292,000	2,268,000	3,750,000	-	-	2,268,000	10.
11	NANDITA ERSIKA	PRESENTER JUNIOR	K/0	HP.03/003/011/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	6,150,000	0	6,150,000	3,250,000	2,900,000	145,000	6,005,000	11.
12	GUNARSO	STORAGE	K/3	HP.03/003/012/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,635,000	0	4,635,000	4,000,000	635,000	31,750	4,603,250	12.
13	FERDAUS GATOT.P	DESAIN GRAFIS SENIOR	K/1	HP.03/003/013/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	2	4,635,000	463,500	4,171,500	3,500,000	671,500	33,600	4,137,900	13.
14	HAPPY SUGIARTI	DESAIN GRAFIS JUNIOR	TK/0	HP.03/003/014/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,000,000	1,200,000	60,000	4,140,000	14.
15	ILLA RUSMAYADI	DESAIN GRAFIS JUNIOR	K/3	HP.03/003/104/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	15.
16	ROKHIM NUGRAHA	VJ SENIOR	K/1	HP.03/003/015/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,150,000	0	4,150,000	3,500,000	650,000	32,500	4,117,500	16.
17	CITRA ANANDA	MCR	K/0	HP.03/003/016/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,250,000	950,000	47,500	4,152,500	17.
18	NUFUS DWI OKTAVIANI	MCR	K/0	HP.03/003/017/PK/2016, TGL. 4 Januari 2016	0	4,200,000	0	4,200,000	3,250,000	950,000	47,500	4,152,500	18.
	JUMLAH DIPINDAHKAN					105,430,000	6,280,500	99,149,500			1,831,600	97,317,900	

Lampiran 11

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 3 0 4 7 0 8 2 7 0 3 9 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BERKAH KARYA BERSAMA

ALAMAT WP : GEDUNG CIMB NIAGA LT.4 SUITE 2 JL. DAAN MOGOT NO. 95 RT.005 RW.005
KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
4 1 1 1 2 2	9 0 0	PPH. PENGADAAN BAHAN KOMPUTER (051) Rp. 166.375.000,-

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak: 2 0 1 6
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : *STP, SKPKB atau SKPKBT*

Jumlah Pembayaran : 2.268.750,- *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : DUA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

a.n. Kepala KPPN Jakarta VII
Kasi Pencairan Dana

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
AHMAD ADI PRASETYO
NIP. 197205101997031002
Nama Jelas : .....

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA, Tgl 2016
Cap dan tanda tangan
AGUS SUTARI, S.Sos.
Nama Jelas : Nip. 196508281987031002

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

4140 T
29/6.16

Mengetahui,
PENANDA TANGAN SPM
SUTANTO PRIAMBODO, SE, M. Si
NIP. 196810081994091003

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 710 0216 4517 5 0717 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran Satker Setjen DPR

ALAMAT WP : Jl. Jend.Gatot Subroto - Jakarta 10270

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh 23 untuk Pekerjaan Penyiaran Filler Warta Parlemen di Kompas TV tanggal.25,26,27 28 dan 29 April (15 Spot),Durasi 2 Menit sesuai SPK No. BP.03/679/SPK/2016 (PT. ANS Project)

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2016

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.600 .000,-

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : # Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah #

a.n. Kepala KPPN Jakarta VI
Kasi Pencairan Dana

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

AHMAD ADI PRASETYO
NIP. 197205101997031002

Nama Jelas :

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII

Wajib Pajak/Penyetor

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Agus Sutari,S.Sos
NIP. 19650826 198703 1002

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

8609 S T
23/6.

Mengetahui,
PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

SATYANTO PRIAMBODO, SE, M.Si
NIP. 196610081994031003

F.2.0.32.01

Lampiran 12

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23

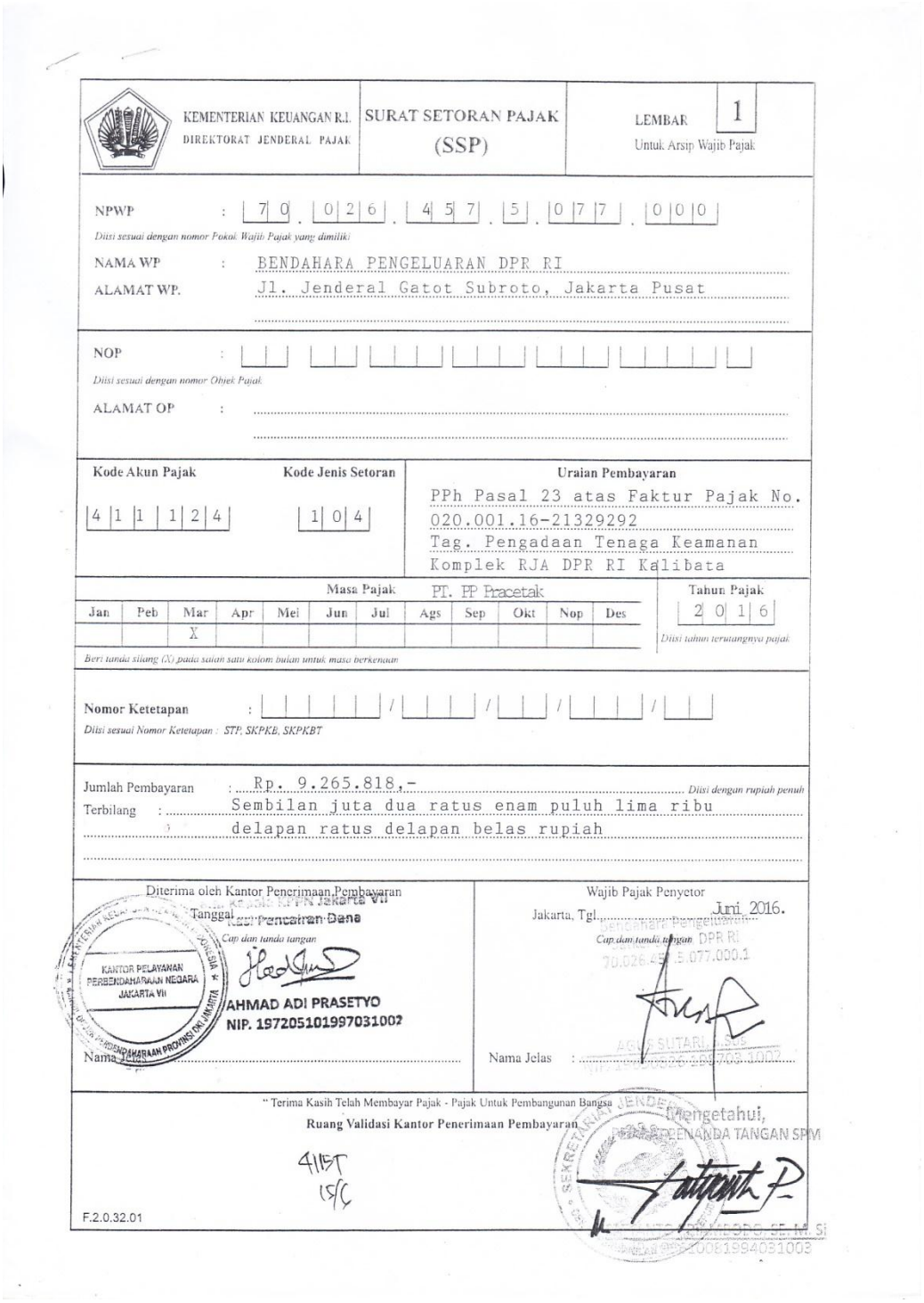

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 70.026.457.5.077.000
Diisi sesuai dengan nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN DPR RI

ALAMAT WP. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

NOP :
Diisi sesuai dengan nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411124	104	PPh Pasal 23 atas Faktur Pajak No. 020.001.16-21329292 Tag. Pengadaan Tenaga Keamanan Komplek RJA DPR RI Kalibata

Masa Pajak PT. PP Pracetak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
		X									

Beri tanda silang (X) pada salah satu kolom bulan untuk masa berkenaan

Tahun Pajak 2016
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKE, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 9.265.818,- Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII
AHMAD ADI PRASETYO
NIP. 197205101997031002
Nama

Wajib Pajak Penyetor
Jakarta, Tgl. Juni 2016.
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

Mengetahui,
PEJABAT BERWENANG TANGAN SPM

F.2.0.32.01

Lampiran 13

Rekapitulasi Perhitungan PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 2 0 6 6 1 6 4 1 0 3 5 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. SINAR MUTIARA
ALAMAT WP : JL. KAMP. BARU NO. 4 RT.005 RW.007 KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
4 1 1 2 1 1	9 0 0	PPN . PENGADAAN BAHAN KOMPUTER (041) Rp. 168.300.000,-

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 1 6

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : *STP, SKPKB atau SKPKBT*

Jumlah Pembayaran : 15.300.000,- *Diisi dengan rupiah penuh*
Terbilang : LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Kasi Pencairan Dana
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
AHMAD ADI PRASETYO
Nama Jelas : NIP. 197205101997031002

Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA Tgl 2016
Cap dan tanda tangan
Bendahara pengeluaran Satker Setjen,
AGUS SUTARI, S.Sos.
Nama Jelas : NIP. 19650826 198703 1002

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Mengetahui,
PEJABAT PENANDA TANGAN SPM
SATYANTO PRIAMBODO, SE, M. Si
NIP. 196610081994031003

4099T
3-6-16
F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 12 | 5 5 1 6 | 4 1 4 1 8 | 5 | 4 1 1 2 | 0 1 0 1 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. ANTS PROJECT

ALAMAT WP : Komp.Barito Blok B No. 2, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis - Depok Rt.001 Rw.001

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4 1 1 1 1 2 1 1 1	9 1 0 1 0	PPnPekerjaan PenyiaranFiller Warta parlemen di kompas TV tanggal 25,26,27,28 dan 29 April (15 Spot),Durasi 2menit sesuai SPK No BP.03/679/SPK/2016.

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan

Tahun Pajak: 2 0 1 1 1 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.000.000,-

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : # Delapan Belas Juta Rupiah #

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Kasi Pencairan Dana

Cap dan tanda tangan

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII

AHMAD ADI PRASETYO

NIP. 197205101997031002

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Agus Sutari, S.Sos

NIP. 19650826 198703 1002

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Mengetahui,

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

SATYANTO PRIAMBODO, SE, M. Si

NIP. 196610081994031003

TTE oleh Fiskus pajak

B609ST 23/6.

F.2.0.32.01

Lampiran 14

Kartu Konsultasi Pembimbing penulisan PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

Building Future Leaders

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Asri Mahyudi
2. No.Registrasi : 8335132400
3. Program Studi : S1 Akuntansi
4. Dosen Pembimbing : Dr. Mardi, M.Si
   NIP.....
5. Judul PKL : Laporan Praktik kerja Lapangan urusan kas dan Pembukuan Subbagian Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Jenderal DPR RI

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15 November 2016	Revisi bab 1 dan 2	Perbaiki bab 2 Sejarah instansi	
2			dan struktur organisasi diperjelas.	
3	22 November 2016	Revisi bab 3	Berikan Ilustrasi, Judul Ilustrasi	
4			dan Sumber Ilustrasi Pekerjaan	
5	23 Desember 2016	Revisi bab 4 dan Lampiran	diperbanyak lagi	
6				
7				
8	10 Januari 2017	Periksa kembali bab 1, 2, 3, 4		
9		dan lampiran		
10				
11				
12				
			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	

Catatan :
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan